

ANALISIS TIPOLOGI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA PERIODE 2015-2022

Meiran Panggabea

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the relationship between income inequality and economic growth, poverty and open unemployment partially. The analysis method uses typology analysis of 34 provinces in Indonesia. The analysis period is 2015-2022. The results of this typology analysis obtained the results (1) negative relationship between economic growth and income inequality, (2) negative relationship between poverty and income inequality, and (3) positive relationship between open unemployment and income inequality.

Keywords: *Income inequality, economic growth, poverty, open unemployment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis relasi antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran terbuka secara parsial. Metode analisis menggunakan analisis tipologi terhadap 34 provinsi di Indonesia. Periode waktu analisis 2015-2022. Hasil dari analisis tipologi ini diperoleh hasil (1) relasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, (2) relasi negatif antara kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan, dan (3) relasi positif antara pengangguran terbuka dengan ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: *Ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran terbuka*

I. PENDAHULUAN

Mengurangi kesenjangan (ketimpangan pendapatan), baik di tingkat intra maupun antar negara merupakan sebuah tantangan yang sangat kompleks, yang melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait. Di tingkat intra, di antara 34 provinsi, angka ketimpangan ekonomi (Gini Ratio/GR) bervariasi dari yang terendah (0,255 di provinsi Kepulauan Bangka Belitung) hingga yang tertinggi (0,459) di provinsi D.I. Yogyakarta. Di tingkat antar negara, ketimpangan pendapatan Indonesia termasuk pada kategori ketimpangan sedang. Negara-negara yang masuk dalam kategori ketimpangan sedang antara lain Vietnam, Meksiko, Polandia, Amerika Serikat, Argentina, Rusia, Uruguay dan Indonesia (GR 0,31 - 0,49).

Prof. Simon Kuznets (1958) yang mengemukakan sebuah hipotesis tentang keterkaitan pembangunan dengan ketimpangan pendapatan berbentuk U terbalik tentang ketimpangan, hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk/tidak merata,

namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik/semakin merata. Sejak kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia telah berjalan hampir 80 tahun (delapan dekade). Meskipun sudah berlangsung hampir 8 dekade, tampak permasalahan ketimpangan pendapatan belum seperti yang diharapkan, bahkan ada kecenderungan semakin timpang terutama bila diurai per propinsi. Di sisi lain, berdasarkan klasifikasi Bank Dunia (*World Bank*), Indonesia masih tergolong pada kelompok negara berpenghasilan menengah tinggi (*Upper Middle Income Countries*) dengan interval US\$ 4.046 - US\$ 12.535 per kapita/tahun. Jika lebih dari US\$ 12.535 per kapita/tahun masuk kategori negara berpendapatan tinggi (*High Income Countries*)

Data BPS tahun 2015 dan 2022 menunjukkan PDB per kapita Indonesia meningkat dari US\$ 3.377,1 (2015) menjadi US\$ 4.783,3 (2022). Pendapatan per kapita yang meningkat ini diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang semakin mengecil, yakni Gini Ratio (GR) menurun dari 0,360 menjadi 0,343 pada periode yang sama. Bila diurai capaian GR dan PDRB per propinsi tahun 2022, tersirat ada inkonsistensi hipotesis Kuznets. Ketimpangan pendapatan terendah (GR=0,255) terjadi di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandai PDRB per kapita sebesar Rp.63,872 juta/tahun. Sementara itu di Propinsi D.I.Yogyakarta, ketimpangan pendapatannya tertinggi di Indonesia (GR = 0,459) dengan PDRB per kapita yang lebih rendah (Rp.44,637 juta/tahun).

Propinsi DKI memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi di Indonesia, yakni Rp.298,360 juta/tahun dengan keadaan ketimpangan pendapatan tinggi (GR = 0,412) atau melebihi rata-rata ketimpangan pendapatan nasional. Di Propinsi NTT dengan PDRB per kapita terendah (Rp.21,718 juta/tahun) ditandai dengan ketimpangan pendapatan yang relatif rendah (GR = 0,340), sedikit di bawah GR Indonesia.

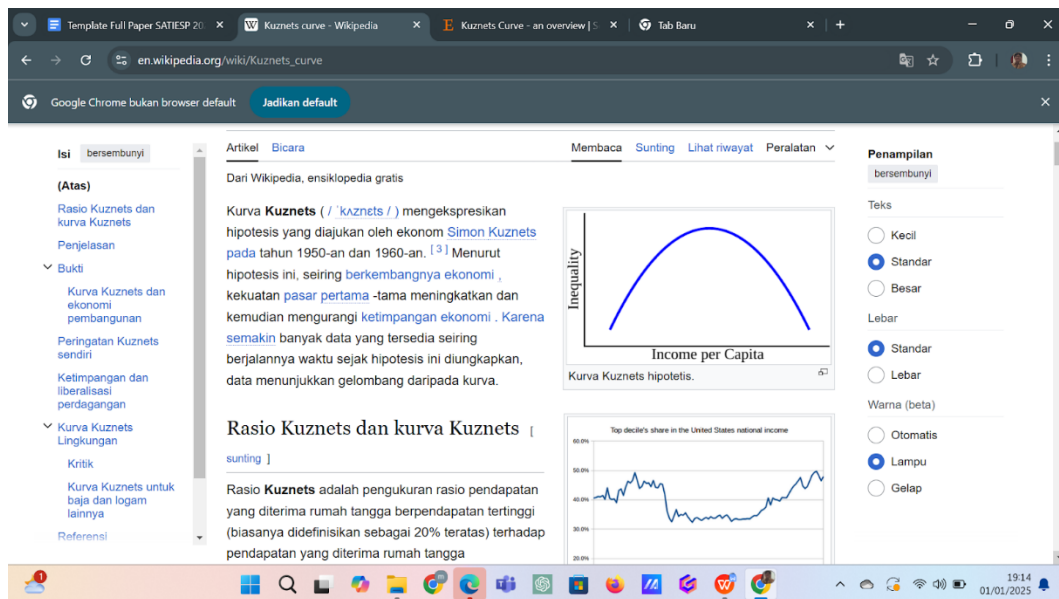
Berdasarkan deskripsi ini dapat diungkapkan bahwa GR tinggi yang terjadi di Propinsi D.I.Yogyakarta dan DKI tidak selalu disertai PDRB per kapita tinggi. Demikian juga sebaliknya, GR rendah yang terjadi di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan NTT, tidak selalu diikuti PDRB per kapita rendah. Ketidakkonsistenan korelasi bisa terjadi karena dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka yang berbeda di masing-masing propinsi. Apakah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka berkorelasi dengan ketimpangan pendapatan. Untuk menjawab pertanyaan inilah penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis tipologi.

II. KAJIAN LITERATUR

Simon Kuznets, seorang ekonom pembangunan dan ahli statistik Rusia-Amerika, yang memperoleh Penghargaan Nobel Ekonomi tahun 1971 berhipotesis bahwa negara-negara industrialisasi mengalami peningkatan dan penurunan berikutnya dalam ketimpangan pendapatan karena adanya migrasi tenaga kerja pedesaan ke daerah perkotaan. Ketika tingkat pendapatan tertentu tercapai, ketimpangan menurun seiring terbentuknya negara kesejahteraan. Dan proses perubahan tersebut digambarkan dalam bentuk kurve “U” terbalik.

Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pembangunan ekonomi secara umum dicirikan oleh kurva U terbalik Kuznets, (Kuznets, 1955) ; Piketty, 2014; Chen, 2003),

yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan dan kemudian menurun seiring dengan perkembangan ekonomi. Artinya, ketimpangan pendapatan akan menurun seiring dengan terus meningkatnya pendapatan di negara-negara berkembang. Akan tetapi, saat pendapatan terus bertambah hingga mencapai level yang lebih tinggi, ketimpangan pendapatan meningkat lagi dan selanjutnya semakin berkurang membentuk huruf “U” terbalik, lihat Gambar 1.



Gambar 1. Kurve “U” Terbalik

Bukti empiris kurva Kuznets berbeda-beda dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Proses. Industrialisasi di Inggris sejalan dengan hipotesis kurva tersebut. Angka ketimpangan pendapatan pada penduduk di Inggris naik dari 0,400 tahun 1823 menjadi 0,627 pada tahun 1871. Akan tetapi, pada 30 tahun kemudian, tepatnya ditahun 1901, koefisien gini berkurang menjadi 0,443. Keadaan yang sama juga dialami oleh negara-negara Eropa lainnya, seperti Prancis, Jerman, dan Swedia yang mengalami industrialisasi pesat.

Berbeda dengan Belanda dan Norwegia serta Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, negara-negara ini mengalami penurunan angka ketimpangan yang konstan selama periode industrialisasi. Ketimpangan menurun, secara konsisten seiring masyarakat mereka beralih dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Studi Acemoglu dan James (2000) mengemukakan bahwa ketimpangan akibat industrialisasi kapitalis mengandung "benih-benih kehancurannya sendiri" dan membuka jalan bagi reformasi politik dan ketenagakerjaan di Inggris dan Prancis, yang memungkinkan redistribusi kekayaan.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dijelaskan bahwa saat berada ditahap awal pertumbuhan ekonomi diikuti oleh distribusi pendapatan yang memburuk kemudian ditahap selanjutnya distribusi pendapatan menjadi membaik (Todaro & Smith, 2011). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan

pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan jika pertumbuhan disebabkan oleh kenaikan pendapatan kelompok kaya yang lebih cepat dibandingkan yang kelompok miskin. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan jika pertumbuhan yang terjadi lebih menguntungkan pemilik modal dibandingkan dengan kaum buruh. Pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada sektor-sektor padat modal.

Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan pertumbuhan ekonomi (Rambey, 2018). Terdapat hubungan yang menjelaskan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat diikuti ketimpangan pendapatan yang meningkat dan sebaliknya (Wahiba & Weriemmi, 2014). Fokus pembangunan ekonomi dalam masa yang singkat lebih ditujukan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Sedangkan, pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan pendapatan maka pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan waktu yang relatif lama dalam mencapainya (Arif & Wicaksani, 2017). Pertumbuhan ekonomi juga dapat mengurangi ketimpangan jika aktivitas ekonomi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi adalah sektor yang menguntungkan kelompok menengah kebawah seperti sektor pertanian, atau manufaktur padat karya (Yusuf, 2018).

Kemajuan pembangunan ekonomi ditopang dengan kualitas sumberdaya manusia yang mumpuni. Perubahan pada modal manusia merupakan faktor yang mendasar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Dalam teori *human capital* menyebutkan modal manusia berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang menurunkan disparitas pendapatan dikarenakan pendidikan mampu membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Schultz, 1981). Peningkatan IPM dalam suatu wilayah yang tidak diikuti peningkatan IPM juga diwilayah lainnya dapat menyebabkan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan (Barro, 2008).

Menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi yang bertumbuh, perhatian terhadap pendapatan/upah pekerja tidak boleh lengah. Upah yang layak menjadi impian para pekerja, Kebijakan menetapkan upah minimum oleh Pemerintah, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Upah minimum provinsi yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat serta dapat meningkatkan daya permintaan akan barang dan jasa. Sehingga berimplikasi akan perbaikan perekonomian suatu wilayah sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan (Rahman & Putri, 2021).

Kemiskinan juga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan (Hindun *et al.*, 2019). Kemiskinan menyebabkan perbedaan distribusi masyarakat sehingga ketika tidak berkurangnya kemiskinan maka menyebabkan ketimpangan semakin meningkat (Arsyad, 2017). Data BPS tahun 2023 mempublikasikan kemiskinan di 34 propinsi. Hampir 50% dari 34 propinsi proporsi penduduk miskinnya melebihi nasional (10,30%). Proporsi penduduk miskin tertinggi terdapat di Propinsi Papua (26,80%), Papua Barat (21,43%) dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (20,23%). Ketimpangan pendapatan di ketiga propinsi ini tergolong ketimpangan sedang dengan GR masing-masing 0,39; 0,38 dan 0,34.

III. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian digunakan data sekunder tahun 2015 dan 2022 yang telah dipublikasi oleh BPS. Unit analisis adalah propinsi di Indonesia yang berjumlah 34 propinsi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Tipologi Klassen dan analisis deskriptif. Tipologi Klassen merupakan suatu tipologi yang digunakan untuk mengetahui pola pemanfaatan dan indikator pembangunan ekonomi suatu daerah. Indikator pembangunan ekonomi meliputi Pertumbuhan Ekonomi, IPM, UMP, Kemiskinan dan Pangangguran. Hubungan antara Ketimpangan Pendapatan dengan masing-masing variabel di kelompokkan ke dalam 4 kuadran, yaitu,

Kwadrant IV : Rata-rata GR _n > Rata-rata GR _p dan Rata-rata PE _n < Rata-rata PE _p	Kwadrant I : Rata-rata GR _n > Rata-rata GR _p dan Rata-rata PE _n > Rata-rata PE _p
Kwadrant III : Rata-rata GR _n < Rata-rata GR _p dan Rata-rata PE _n < Rata-rata PE _p	Kwadrant II : Rata-rata GR _n < Rata-rata GR _p dan Rata-rata PE _n > Rata-rata PE _p

Keterangan : GR_n = Gini Ratio Nasional ; GR_p = Gini Ratio Propinsi ; PE_n = Pertumbuhan Ekonomi Nasional ; PE_p = Pertumbuhan Ekonomi Propinsi

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

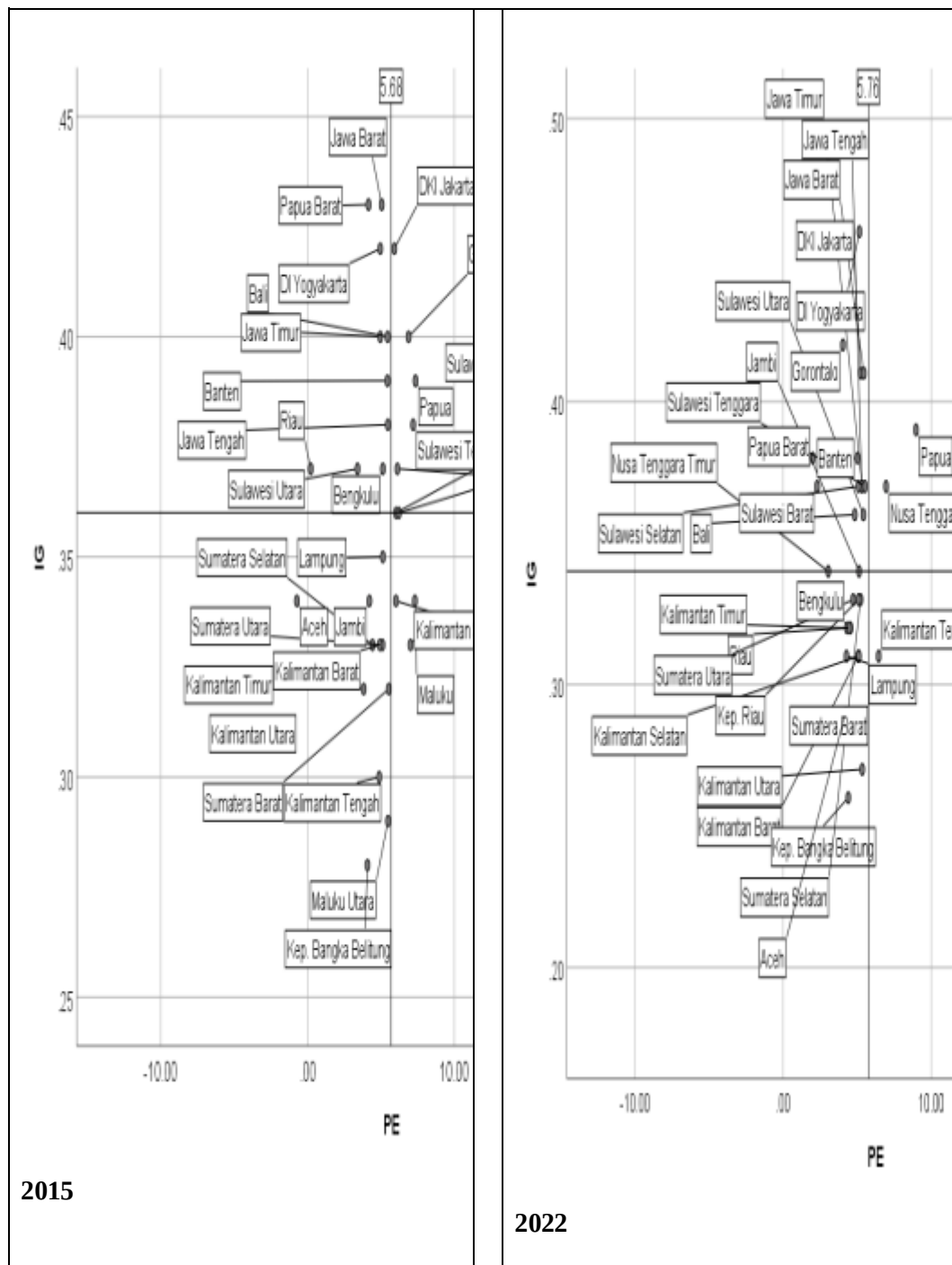
4.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Secara teoritis, kemajuan pembangunan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (GR mendekati angka 0). Kondisi yang diinginkan adalah ketimpangan pendapatan yang rendah terwujud pada tahap pembangunan sudah mencapai tahap kelima versi Rostow (1960) dalam Todaro dan Smith (2011); Jhingan (2016) yang disebut tahap konsumsi massa tinggi (*High Mass Consumption*). Jika kita membagi kurve “U” terbalik versi Simon Kuznets, maka bisa dikatakan relasi antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan berkorelasi positif - negatif signifikan atau positif-negatif tidak signifikan.

Angka Ketimpangan Pendapatan (GR) di Indonesia tahun 2015 adalah 0,36 dan pertumbuhan ekonomi 5,68 persen. Berdasarkan analisis tipologi, pada kuadran I terdapat tiga propinsi yang 8 propinsi yang angka Gini Rationya melebihi GR nasional dan Pertumbuhan Ekonominya (PE) melebihi PR nasional. Kedelapan propinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi tinggi terjadi di Pulau Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi tinggi menggambarkan pendapatan per kapita tinggi. Kwadrant I ini sejalan dengan teori Kuznets yang menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi pada masa transisi dari sektor pertanian ke sektor industri.

Tahun 2022, terjadi peningkatan pada rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,76 persen dengan angka ketimpangan pendapatan rata-rata yang semakin menurun, yakni 0,34. Jumlah propinsi yang berada pada kuadran I semakin berkurang, Hanya terdapat 2 propinsi, yaitu propinsi Papua dan Nusa Tenggara Barat. Tahun 2022, di

Propinsi Papua, pertumbuhan ekonomi tinggi (8,97%) disertai dengan GR yang semakin lebar, yakni 0,393. Demikian juga di Propinsi Nusa Tenggara Barat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi (6,95%) disertai dengan GR yang semakin lebar, yakni 0,374. Keadaan ini menandakan adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, lihat Gambar 1



Gambar 1. Relasi Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Ketimpangan Pendapatan (IG atau GR) Tahun 2015 dan 2022

Berkurangnya jumlah propinsi yang berada di kwadran I mengindikasikan adanya dampak buruk dari pandemic Covid-19 di tahun 2020-2021 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi di seluruh propinsi. Pertumbuhan ekonomi rendah atau semakin lambat namun angka ketimpangan semakin melebar. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah propinsi di kwadran IV. Bertambah dari 10 propinsi (2015) menjadi 15 propinsi (2022). Kwadran IV menggambarkan pertumbuhan ekonomi propinsi lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional dan ketimpangan pendapatan propinsi lebih tinggi dari ketimpangan pendapatan nasional.

Kwadran II menggambarkan pertumbuhan ekonomi tinggi (melebihi PE nasional) dengan ketimpangan pendapatan yang rendah ($< GR$ nasional). Jumlah propinsi yang berada di kwadran II ada 4 propinsi di tahun 2015 dan 2022. Keadaan pada kwadran II adalah yang kondisi diinginkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok terbawah sehingga perbedaannya dengan kelompok berpendapatan tinggi semakin kecil,

Kwadran III menggambarkan pertumbuhan ekonomi rendah disertai ketimpangan rendah, lebih rendah dari nasional. Keadaan seperti ini terjadi di 10 propinsi, baik tahun 2015 maupun tahun 2022 dan kesepuluh propinsi ini seluruhnya berada di luar Pulau Jawa. Masyarakat di sepuluh propinsi ini sebagian besar berpendapatan rendah dan jumlahnya lebih banyak dari kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, lihat Gambar 1.

Kwadran I dan Kwadran III menunjukkan relasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, sedangkan Kwadran II dan Kwadran IV menggambarkan relasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Jumlah propinsi terbanyak berada pada kwadran IV. Temuan ini sama dengan penelitian Istiqamah *et al* (2018) di Indonesia yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan studi Nadya & Syafri (2019) di Indonesia, Alamanda (2021) di 50 negara, Putri *et al* (2015) di Indonesia dan Arif & Wicaksani (2017) di Jawa Timur serta Szczepaniak *et al* (2022); Jewaru dan Ervina (2022) yang menemukan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan Acemoglu & Robinson, (2014); Rulita dan Rachmad (2023) membuktikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan.

4.2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

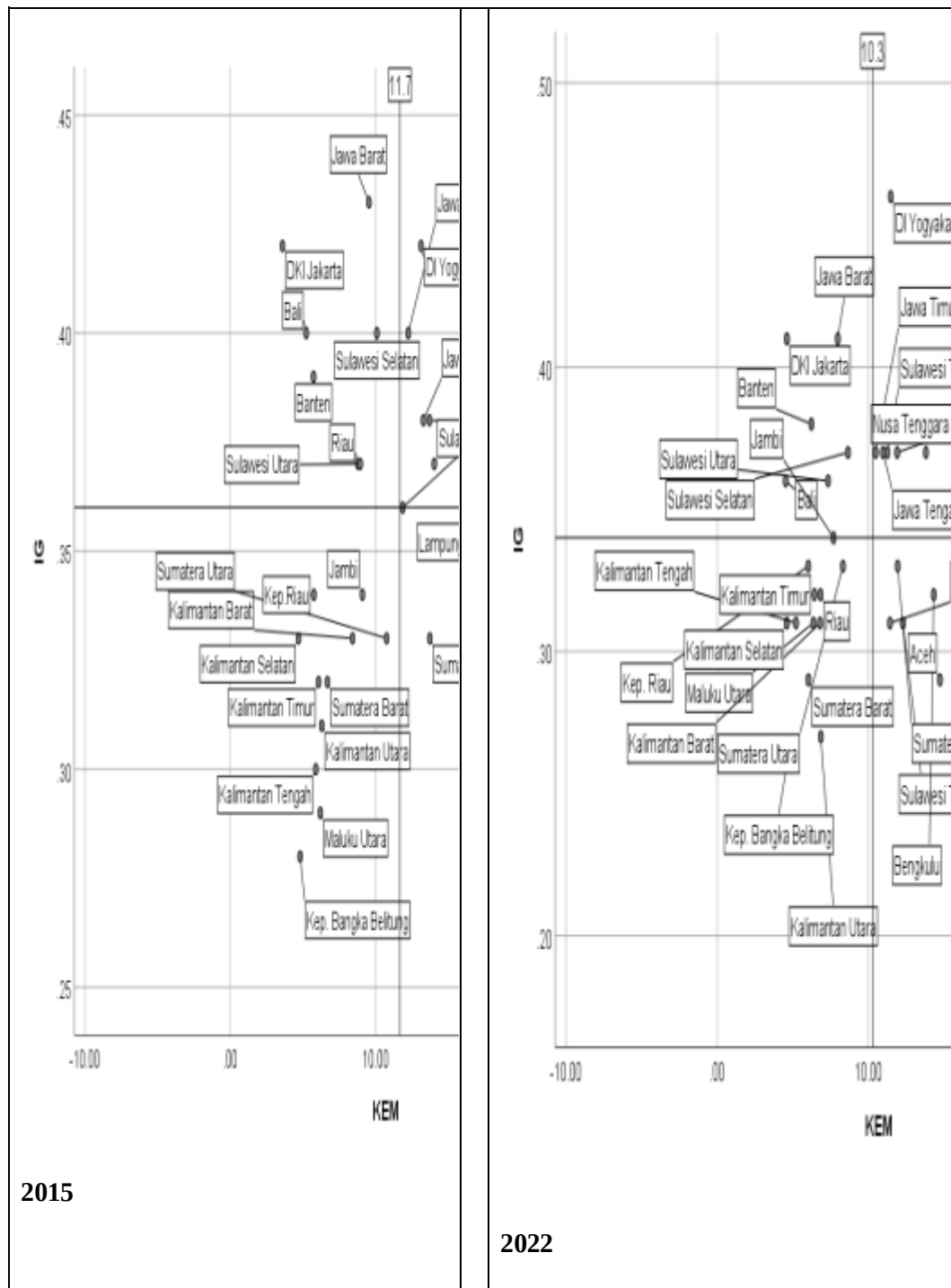
Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang tak kunjung selesai, baik di negara maju maupun negara berkembang apalagi di negara terbelakang, termasuk di Indonesia. Hingga tahun 2022, pembangunan Indonesia masih terbebani penduduk miskin sebanyak 10,3 persen. Kemiskinan berkorelasi dengan ketimpangan pendapatan. Penduduk miskin relatif lebih sulit meningkatkan pendapatannya dibandingkan kelompok kaya. Berikut ini analisis tipologi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tahun 2015 dan 2022. Pada tahun 2015, rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia 11,7 persen dan ketimpangan pendapatan sebesar 0,36 dan pada tahun 2022 rata-rata jumlah penduduk

miskin di Indonesia berkurang menjadi 10,3 persen dengan ketimpangan pendapatan yang berkurang menjadi 0,34, lihat Gambar 2.

Gambar 2 menjelaskan belum adanya perubahan yang berarti pada kemiskinan di Indonesia, terutama dari perspektif kewilayahan. Jumlah propinsi yang persentase kemiskinannya lebih rendah dari persentase kemiskinan nasional pada tahun 2015 dan 2022 tetap sebanyak 18 propinsi (Kwadrant III dan Kwadrant IV).

Tahun 2015, terdapat 11 propinsi yang berada di kwadrant I yang menggambarkan tingkat kemiskinan melebihi 11,7% dengan tingkat ketimpangan melebihi 0,36%. Di antara 11 propinsi pada kwadrant I, Propinsi Papua memiliki penduduk miskin tertinggi (28,4%) dengan ketimpangan pendapatan tinggi ($GR=0,39$). Kemudian pada tahun 2022, jumlah propinsi yang berada di kwadrant I berkurang 1 (propinsi Bengkulu) menjadi 10 propinsi. Propinsi Bengkulu berubah dari Kemiskinan tinggi dan ketimpangan tinggi (2015) menjadi kemiskinan tinggi dan ketimpangan rendah (2022).

Relasi negatif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada Kwadrant II dan Kwadrant IV dialami oleh 13 propinsi pada tahun 2015 dan 2022. Ini bermakna bahwa kemiskinan semakin tinggi diikuti ketimpangan yang semakin rendah dan sebaliknya. Sedangkan relasi positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada Kwadrant I dan Kwadrant III terjadi di 21 propinsi pada tahun 2015 dan 2022. Ini berarti kemiskinan yang semakin tinggi diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Berdasarkan analisis ini dapat dinyatakan bahwa korelasi antara kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan adalah positif. Hasil penelitian yang mendukung Hindun *et al* (2019); Azas dan Meiran (2020) di Indonesia dan Hassan *et al* (2015) di Pakistan menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.



Gambar 2. Relasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2015 dan 2022

4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan

Secara teoritis, pengangguran terbuka disebabkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja (*labour supply*) dengan ketersediaan lapangan pekerjaan (*labour demand*). Di Indonesia pada saat ini terjadi kelebihan penawaran (*over supply*), penambahan penawaran tenaga kerja jauh lebih banyak dibanding permintaan. Selain

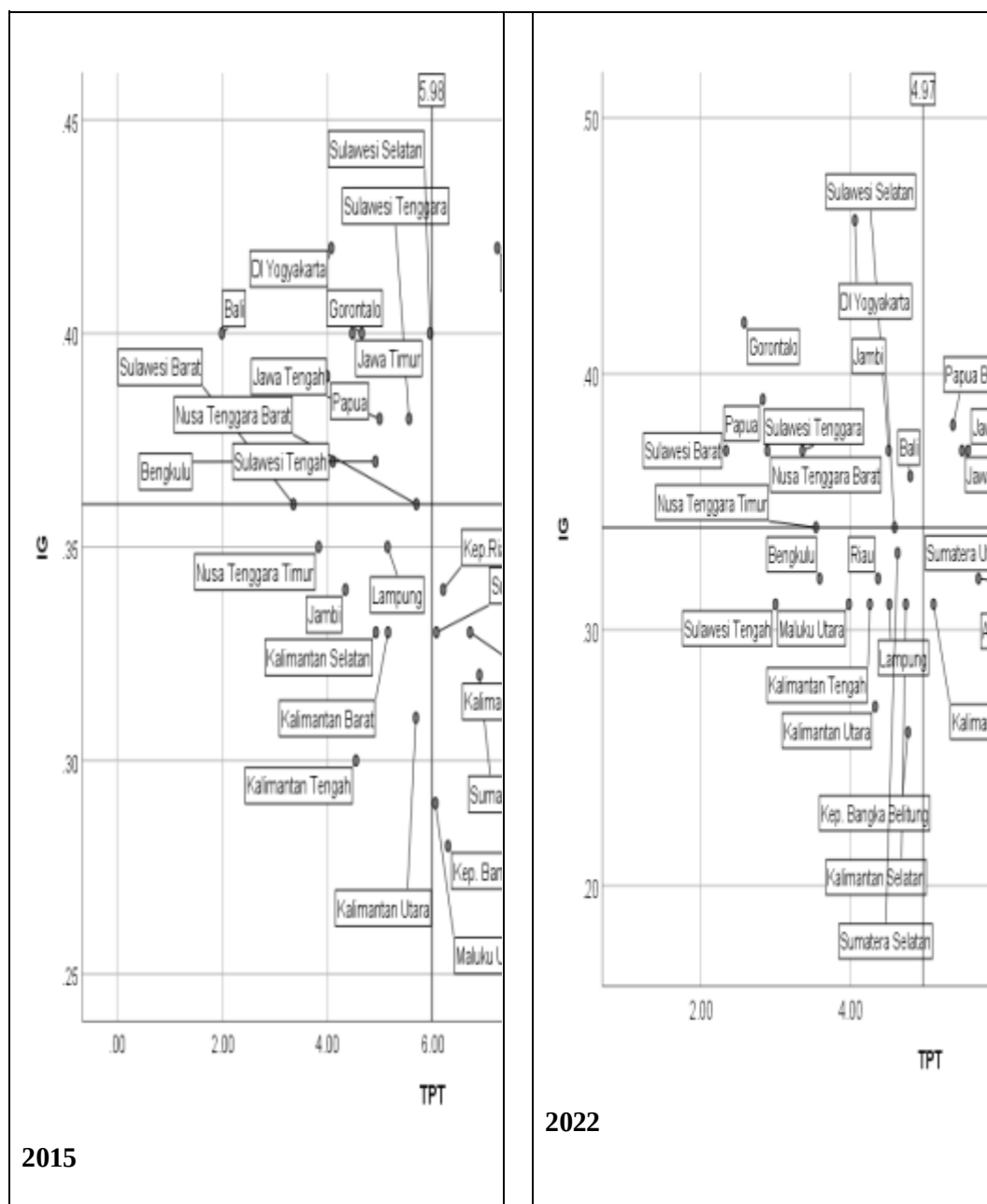
karena faktor ketidakseimbangan pasar kerja, pengangguran terbuka juga disebabkan oleh keterbatasan informasi dalam mencari pekerjaan, ketidaksesuaian dalam memilih bidang pekerjaan tertentu. Dalam konteks ekonomi, masalah pengangguran sering terjadi karena dapat mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan. Penurunan pendapatan akibat pengangguran dapat mengakibatkan pengurangan pengeluaran konsumsi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan serta menjadikan ketimpangan pendapatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun selama periode 2015-2022 TPT Indonesia menurun dari 5,98% (2015) menjadi 4,97% (2022). Tahun 2022, di masa Pandemi Covid-19 TPT lebih tinggi lagi yakni 6,03. Pada periode yang sama ketimpangan ekonomi turun dari 0,36 menjadi 0,34. TPT tertinggi tahun 2015 terdapat di Propinsi Aceh dan Propinsi Maluku (9,93%) dengan ketimpangan pendapatan sebesar 0,34. Tahun 2022, TPT tertinggi bergeser ke Propinsi Jawa Barat dengan angka yang lebih rendah (8,31%) dengan ketimpangan pendapatan 0,41. Analisis tipologi TPT dengan ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya pergeseran, lihat Gambar 3

Gambar 3 menunjukkan pada tahun 2015 propinsi yang berada pada kwadran I ada sebanyak 6 propinsi (yaitu Jawa Barat, Papua Barat, DKI Jakarta, Banten, Riau, Sulawesi Utara). TPT di kwadran I melebihi 6 persen dengan ketimpangan pendapatan lebih besar dari 0,36. TPT tertinggi di Propinsi Banten (8,09%) dengan ketimpangan sebesar 0,38. Tahun 2022, propinsi yang berada di Kwadran I tetap enam propinsi dengan pergeseran DKI Jakarta dan Riau digantikan Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kwadran I menggambarkan kesejahteraan yang memburuk dimana yang miskin semakin miskin karena menganggur dan yang kaya semakin kaya terutama yang memiliki banyak asset. Kwadran I dan Kwadran III menunjukkan relasi positif antara TPT dengan ketimpangan pendapatan. Di Kwadran III menggambarkan keadaan TPT rendah dan ketimpangan pendapatan juga rendah. Jumlah propinsi yang berada pada kwadran III ini bertambah dari 7 propinsi (2015) menjadi 9 propinsi (2022). TPT rendah disertai dengan ketimpangan pendapatan rendah merupakan tujuan yang diharapkan dari proses pembangunan yang dilaksanakan.

Kwardran II dan Kwadran IV menggambarkan relasi negatif antara TPT dengan ketimpangan ekonomi. TPT rendah ketimpangan tinggi bisa terjadi dalam proses pembangunan, terutama daerah/negara berbasis sektor primer. Banyak yang terserap dalam lapangan kerja pertanian dan pertambangan dengan upah relatif rendah (di bawah garis kemiskinan). Jumlah propinsi yang masuk dalam kategori III ini berkurang dari 12 propinsi (2015) menjadi 9 propinsi (2022). Kesembilan propinsi ini adalah D.I.Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil studi Simalango dan Ririt (2024) yang menyimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.



Gambar 3. Relasi Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan, 2015 dan 2022

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian dan analisis tipologi yang telah diutarakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat relasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2015-2022
2. Terdapat relasi positif antara kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2015-2022

3. Terdapat relasi positif antara pengangguran terbuka dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2015-2022

Terkait dengan simpulan ini, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia, kebijakan pembangunan ekonomi *pro growth*, *pro poor*, *pro job* harus terus dijalankan secara konsisten ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan desa terus dipacu dengan penambahan anggaran Dana Desa terkhusus desa yang masih tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2014). *Why Nations Fail*. Profile Books Ltd.
- Alamanda, A. (2021). The Effect of Economic Growth on Income Inequality: Panel Data Analysis From Fifty Countries. *Info Artha*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1176>
- Alisjahbana, Armida, 2012, Rasio Gini di Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir, Bappenas.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.
- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed). Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Asian Development Bank, 2012, *Asian Development Outlook 2012. Confronting rising inequality in Asia*, Mandaluyong City, Philippines.
- Azas L, Hartono and Meiran Panggabean, 2020. Poverty and Income Inequality in Indonesia. *Journal of Research in Business, Economics and Management* 14(3), 2688-2702.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Gini Ratio Menurut Provinsi 2016-2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2016-2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi 2016-2021*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Upah minimum Menurut Provinsi Tahun 2016-2021*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2015-2022*. Badan Pusat Statistik.

Bandyopadhyay, S. (2018). The absolute Gini is a more reliable measure of inequality for time dependent analyses (compared with the relative Gini). *Economics Letters*, 162, 135–139. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.07.012>

Banerjee, A. K. (2010). A multidimensional Gini index. *Mathematical Social Sciences*, 60(2), 87–93. <https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2010.06.001>

Barro, R. J. (2008). *Inequality and Growth Revisited*. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration.

Becker, Gary S.; Murphy, Kevin M. (May 2007). "The Upside of Income Inequality". *The America*. Archived from the original on January 2, 2014. Retrieved January 8, 2014.

Bosworth, Barry; Burtless, Gary; Steuerle, C. Eugene (December 1999). *Lifetime Earnings Patterns, the Distribution of Future Social Security Benefits, and the Impact of Pension Reform* (PDF) (report no. CRR WP 1999-06). Chestnut Hill, MA: Center for Retirement Research at Boston College. p. 43. Archived from the original (PDF) on July 19, 2010. Retrieved October 1, 2012.

Elliott, Larry (December 7, 2021). "Global inequality 'as marked as it was at peak of western imperialism'". *The Guardian*. Retrieved December 8, 2021.

Gurría, Angel (2011). *Press Release for Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising* (Report). OECD. doi:10.1787/9789264119536-en. ISBN 9789264111639

Hassan, S. A., Zaman, K., & Gul, S. (2015). The Relationship between Growth-Inequality-Poverty Triangle and Environmental Degradation: Unveiling the Reality. *Arab Economic and Business Journal*, 10(1), 57–71. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2014.05.007>.

Hindun, Soejoto, A., & Hariyati. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>

Ilham, M., & Pangaribowo, E. H. (2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4).

Istikharoh, Prijanto, W. J., & Destiningsih, R. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 -. *DINAMIC*, 2(1).

Istiqamah, Syaparuddin, & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-Provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111–126.

Jewaru, Dyonisius H.S. dan Ervina Jayanti Siagian (2022). Determinan Ketimpangan Dan Kemiskinan Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Inklusif (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Timur). *JSTAR Vol. 2 (1) 2022*, p. 71-86.

Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers.

Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Dinamic: Directory Journal of Economic*, 1(3), 338–347.

Lawson, Max; Martin, Matthew (October 9, 2018). "The Commitment to Reducing Inequality Index 2018". Oxfam. Retrieved November 13, 2018

Nadya, A., & Syafri. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>

Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 7(2), 9–26. <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5326>.

Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/3158/847>.

Purnama, N. I. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonikawan*, 564, 1–73. <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5326>.

Piketty, Thomas (2014). *Kapital di Abad ke-21*. Belknap Press. ISBN Telepon: 978-0674430006.

Putri, Y. E., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6).

Rambey, M. J. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Education and Development Institut*, 4(1), 32–36.

Rulita, Insyira dan Rachmad Kresna Sakti (2023). Perbankan Dan Indikator Ekonomi: Sebuah Analisa Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Asean-3. *Journal Of Development Economic And Social Studies*. 2(3). p.701-715.

Sarkodie, S. A., & Adams, S. (2020). Electricity access, human development index, governance and income inequality in Sub-Saharan Africa. *Energy Reports*, 6, 455–466. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.02.009>.

Schultz, T. W. (1981). *Investing in People: The economics of population quality*. Universitas of California Press.

Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Manusia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26, 9(1), 18–26. Uny.ac.id.

Simalango, Mikhael dan Ririt Iriani Sri Setawati (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan {endapatan di Kawasan Gerbang Kertosusila, Jambura *Economic Educational Journal*, 6(2), p.433-442

Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34–43 <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/59>.

Szczepaniak, Małgorzata et al.(2022). “Impact of institutional determinants on income inequalities in Indonesia during the Era Reformasi”.*Journal of Asian Economics*.

Todaro, M. P., & Smith, S. c. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi 11). Erlangga.

Wahiba, N. F., & Weriemmi, M. El. (2014). The relationship between economic growth and income inequality. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 4(1), 135–143.

Wibowo, T. (2017). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 111–132. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.184>.